



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
KECAMATAN KALAENA**

**2025**



**LAPORAN EVALUASI KEPALA  
SUB BAGIAN PERENCANAAN  
DAN KEPEGAWAIAN  
TRIWULAN I**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja.

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 2 (dua) Kegiatan yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan memfasilitasi bagian Perencanaan dan Kepegawaian yang ada di Kantor Kecamatan Kalaena dalam pelaksanaan Kegiatan sebagai bentuk dukungan dalam mencapai target. Pembentukan Organisasi Kantor Camat Kalaena ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, Kedudukan Kantor Camat Kalaena yang dipimpin oleh camat merupakan Lembaga Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dimana Camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan/desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah bertanggung jawab kepada Camat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Kantor Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur memiliki tugas dan fungsi yaitu :

1. Merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran Kecamatan Kalaena sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
3. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sub Bagian;
4. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sub Bagian ;
5. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sub Bagian ;
6. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran ;
7. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi statistik Kecamatan ;
8. Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan ;
9. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan menyusun rancangan rencana strategi ;
10. Menyiapkan bahan dan menyusun pengusulan rencana anggaran pendapatan dan Kecamatan ;
11. Menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran ;
12. Menyiapkan bahan atau data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran ;
13. Menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Kecamatan ;
14. Mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data berbasis teknologi informasi ;
15. Menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai ;
16. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan perjalanan Dinas pegawai ;
17. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
18. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi jabatan, dan bezetting pegawai ;

19. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi aparatur meliputi usul kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, penilaian pelaksanaan pekerjaan, kenaikan gaji berkala, cuti, ijin, masa kerja, peralihan status, dan layanan administrasi kepegawaian lainnya ;
20. Menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda jasa pegawai negeri sipil ;
21. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil ;
22. Mengembangkan penerapan sistem informasi aparatur berbasis teknologi informasi ;
23. Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan dan kepegawaian serta yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan ;
24. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan Kecamatan ;
25. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan ;
26. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

## BAB II PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka di perjanjikan 2 (dua) Kegiatan dengan 6 (Enam) Sub Kegiatan sesuai yang tercantum dalam perjanjian kinerja yaitu:

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 13,383,000	APBD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 5,313,500	APBD
3.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 3,859,500	APBD
4.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 12,436,500	APBD
5.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp. 6,194,500	APBD
6.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp. 28,002,000	APBD
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>		<b>Rp. 69,189,000</b>	<b>APBD</b>

## A. Rencana Aksi (RA)

Berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun, Sub Bgaian Perencanaan dan Kepegawaian membuat rencana aksi dalam mewujudkan pencapaian dalam pertriwulan

**Tabel 2.3**  
**Rencana Aksi Berdasarkan Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Anggaran T.A 2025 Kepala Sub Bagian Perencanaan Kepegawaian**

NO	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	TW I		TW II		TW III		TW IV	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Tepat Waktu (%)	100%	6,940,000	100%	7,570,000	100%	10,172,500	100%	10,310,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1,500,000	1 Dok	4,668,000	1 Dok	4,215,000		3,000,000
	Kordinsi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		-	-	-	1 Dok	2,779,500	1 Dok	2,534,000
	Kordinsi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	1,985,500	-	-	-	-	1 dok	1,874,000
	Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dok	3,454,500	2 Dok	2,902,000	2 Dok	3,178,000	2 Dok	2,902,000

<b>2.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase rata-rata capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>17,510,500</b>	<b>100%</b>	<b>13,739,000</b>	<b>100%</b>	<b>1,542,000</b>	<b>100%</b>	<b>1,405,000</b>
	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3	1,842,500	3	1,405,000	3	1,542,000	3	1,405,000
	Bimbingan Teknis implemetasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	15,668,000	1	12,334,000				

### **BAB III REALISASI KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian**

Berdasarkan evaluasi atas Rencana Aksi triwulan I Tahun Anggaran 2025 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

NO	SUB KEGIATAN	Target Tahunan	TRIWULAN I		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen			
3.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen	1	1	100%
4.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	4	4	100%
5.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	3	3	100%
6.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	3 Orang	3	-	
<b>Jumlah</b>		<b>36</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>300</b>
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>		<b>75%</b>			

Berdasarkan table capaian diatas, maka dapat dilihat presentase capaian Triwulan I tahun 2025 adalah 75% dari target yang di rencanakan. Dari hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan Gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya:

#### **B. Analisis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.**

##### ➤ **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**

Uraian:

Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah merupakan siklus manajerial yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan bertujuan untuk

menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, serta berorientasi pada hasil. Pengalokasian anggaran dapat dilakukan secara tepat melalui perencanaan yang baik, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan ini didukung oleh empat sub kegiatan sebagai berikut :

**1. Penyusunan Dokumen Perencana Perangkat Daerah**

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Sub Kegiatan ini terlaksana di Triwulan II dan III.

**2. Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD**

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD sub Kegiatan ini terlaksana pada Triwulan III dan IV.

**3. Koordinasi dan Penyusunan dokumen DPA-SKPD**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu dengan target yang telah ditetapkan Triwulan I yaitu 1 Dokumen dan terealisasi sebanyak 1 Dokumen sehingga capaiannya 100%. Adapun dokumen yang dihasilkan pada sub kegiatan ini yaitu:

- Dokumen DPA Pokok 2025

Tabel capaian sub kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Triwulan I			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	1	1	100	Sangat Baik

**a. Analisis Capaian Kinerja Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.**

Dari hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan Gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya:

### **Faktor Penyebab Keberhasilan:**

- Perencanaan yang matang – Singkronisasi Data yang akurat antara data RKPD dan KUA-PPAS.
- SDM Aparatur yang kompeten – Aparatur memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- Data yang akurat – Didukung oleh informasi valid dan terkini berbasis data.
- Koordinasi yang efektif dengan instansi terkait (OPD, Bappeda, dan BPKAD) berjalan lancar.
- Komitmen dan dukungan dari pimpinan.
- Pemanfaatan teknologi informasi seperti Penggunaan sistem seperti SIPD RI.

### **Faktor Penyebab Kegagalan:**

- Tidak adanya kendala dalam pencapaian kinerja pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.

### **Alterntive Solusi yang dilakukan:**

- Dalam usaha peningkatan kinerja sensntiasa memberikan arahan, pembimbingan serta dukungan kepada Staf dalam pelaksanaan tugas.

## **4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun dengan target yang telah ditetapkan Triwulan I yaitu 4 Laporan dan terealisasi 4 Laporan sehingga capaiannya 100%. Adapun dokumen yang dihasilkan yaitu:

- Laporan LAKIP
- Laporan LKPJ
- Laporan Evaluasi Triwulan IV tahun 2024
- Laporan Evaluasi RKPD tahun 2024.

Tabel capaian sub kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Triwulan I			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	100%	Sangat Baik

**a. Analisis Capaian Kinerja Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.**

Dari hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan Gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya:

**Faktor Penyebab Keberhasilan:**

- Tersusunnya perencanaan kinerja yang jelas.
- Sumber data yang valid dan akurat – Didukung oleh sistem informasi dan pelaporan yang baik.
- Komitmen pimpinan – Dukungan aktif dari kepala perangkat daerah.
- Pemanfaatan teknologi – Penggunaan sistem e-kinerja atau aplikasi pemantauan.

**Faktor Penyebab Kegagalan:**

- Tidak adanya kendala dalam pencapaian kinerja pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.

**Alterntive solusi yang dilakukan:**

- Menjadikan hasil penilaian kinerja sebagai dasar dalam memberikan Reward dan punishment.

➤ **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Uraian:

Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah merupakan proses pengelolaan sumber daya manusia di instansi perangkat daerah guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja aparatur sipil negara (ASN). Administrasi kepegawaian mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, pengangkatan, mutasi, promosi, hingga pemberhentian pegawai. Selain itu, administrasi ini juga mencakup pengelolaan hak dan kewajiban pegawai, seperti gaji, tunjangan, cuti, serta pembinaan dan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan sistem administrasi yang baik, perangkat daerah dapat memastikan bahwa setiap ASN bekerja sesuai dengan regulasi yang berlaku dan mampu memberikan

pelayanan yang optimal kepada masyarakat guna mendukung terciptanya birokrasi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Target Kinerja yang ditetapkan sampai dengan Triwulan I yaitu **100%** dengan Realisasi Kinerja **100%** atau Capaian kinerja **100%**. Kegiatan ini didukung oleh dua sub kegiatan sebagai berikut :

**1. Pendataan dan Pengolahan administrasi Kepegawaian**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian Target yang telah ditetapkan sebanyak 3 dokumen dan terealisasi sebanyak 3 dokumen sehingga capaiannya 100%. Dokumen yang dihasilkan yaitu laporan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang disusun perbulan selama I Triwulan yang didalamnya memiliki laporan tentang DUK, daftar kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat absensi pegawai, cuti dan izin pegawai.

Tabel Capaian Sub Kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Triwulan I			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3	3	100%	Sangat Baik

**a. Analisis Capaian Kinerja Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.**

Dari hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan Gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya:

**Faktor Penyebab Keberhasilan:**

- SDM Aparatur yang kompeten – Aparatur memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- Data kepegawaian yang akurat dan terupdate dengan menggunakan Sistem informasi kepegawaian (seperti SIMPEG) yang dikelola dengan baik.

**Faktor Penyebab Kegagalan:**

- Tidak adanya kendala dalam pencapaian kinerja pada sub kegiatan Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.

**Alternative Solusi Yang Dilakukan:**

- Penerapan SOP pada setiap proses administrasi kepegawaian, seperti pengusulan kenaikan pangkat, cuti, pensiun, dan lain-lain.

**2. *Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan***

Indicator pada sub kegiatan ini yaitu jumlah orang yang mengikuti Bimtek. Berdasarkan anggaran kas sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan -undangan dilaksanakan pada Triwulan II.

**BAB IV**  
**REALISASI KEUANGAN**

Realisasi keuangan atas pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian disajikan pada tabel berikut :

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TRIWULAN I		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
-	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>34,992,500</b>	<b>6,940,000</b>	<b>5,856,000</b>	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13,383,000	1,500,000	1.500.000	100%
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5,313,500	-	-	-
3.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SPD	3,859,500	1,985,500	1,555,500	78.34%
4.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,436,500	3,454,500	2,800,500	81.06%
-	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>34,196,500</b>	<b>17,510,500</b>	<b>1,842,500</b>	
1.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6,194,500	1,842,500	1,842,500	100%
2.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28,002,000	15,668,000	-	
<b>Jumlah</b>		<b>63,875,500</b>	<b>22,950,500</b>	<b>7,698,500</b>	
<b>Rata-rata Capaian Keuangan</b>		<b>33,54%</b>			

## BAB V PENUTUP

Capaian realisasi kinerja dan realisasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan pada Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian dapat dilihat pada table berikut :

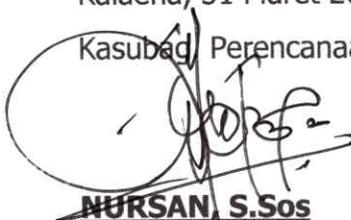
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN
75%	33,54%

Kesimpulan :

- ✓ Rata-rata capaian kinerja tidak mencapai 100% hal ini disebabkan karena tidak adanya undangan BIMTEK untuk Triwulan I.
- ✓ Penyebab utama rendahnya capaian realisasi anggaran pada Sub Kegiatan ini adalah adanya efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden No.1 Tahun 2025 yang mengakibatkan pengurangan anggaran pada Sub Kegiatan.

Kalaena, 31 Maret 2025

Kasubag, Perencanaan dan Kepegawaian



**NURSAN, S.Sos**

Pangkat/Gol : Penata Muda, Tk. I, III/d  
NIP. : 19780902 200604 1 011

